

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya angka pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia merupakan salah satu tantangan berat yang harus dihadapi sektor pertanian Indonesia, karena dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi, dan perubahan selera masyarakat maka permintaan pangan akan semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitasnya khususnya pada komoditas padi. Di Indonesia padi memegang peranan penting karena produk olahannya (beras) merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan sumber makanan pokok hampir 40 persen dari populasi penduduk dunia dan makanan utama dari penduduk Asia Tenggara. Tanaman padi merupakan tanaman penghasil beras yang produksinya diupayakan ketersediaannya sepanjang tahun karena dibutuhkan sebagai bahan makanan pokok 90 persen masyarakat Indonesia (Kurniasih dkk., 2008).

Sentra produksi padi di Indonesia tersebar di beberapa wilayah. Penyebaran sentra produksi ini menunjukkan bahwa produk tidak terpusat pada satu daerah saja. Salah satunya Kabupaten Ciamis yang sebagian besar mata pencarian penduduknya bertani, sehingga sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dominan dibandingkan sektor lainnya. Luas wilayah Kabupaten Ciamis adalah 1.425,68 Km² dengan luas panen tanaman padi 50.620 Ha dan dengan produktivitas 5,62 ton/Ha. BPS Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi yang dominan sebesar 23,60 persen terhadap PDRB Kabupaten Ciamis pada tahun 2020. Kondisi ini menggambarkan bahwa sudah sepantasnya pemerintah daerah harus lebih berpihak terhadap pengembangan potensi sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan kehutanan (BPS Kabupaten Ciamis, 2021).

Kecamatan Purwadadi merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Ciamis yang mayoritas penduduknya sebagai petani. Kecamatan Purwadadi mempunyai luas lahan sawah terbesar ke-tiga setelah Kecamatan Lakbok dan Kecamatan Pamarican. Luas lahan di Kecamatan Purwadadi mencapai 5.447 Ha,

terdiri dari lahan tanah sawah seluas 2.651 Ha dengan produktifitas 64,74 Kw/Ha. Dilihat dari penggunaannya tanah sawah terdiri dari tanah sawah irigasi seluas 1.903,260 Ha, dan setengah teknis seluas 213 Ha, tanah sawah tadah hujan seluas 416 Ha, dan rawa seluas 118,740 Ha dan luas tanah kering 2.796 Ha (BPS Kecamatan Purwadadi, 2020).

Pembangunan pertanian di Kabupaten Ciamis selain diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan, juga diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian yang modern, tangguh, efisien, dan berkelanjutan sehingga dapat bersaing di era pasar bebas (BPS Kabupaten Ciamis, 2021). Pemerintah daerah mengupayakan produktivitas padi meningkat dengan berbagai cara, salah satunya dengan menyediakan tenaga penyuluh pertanian. Karena keberhasilan program pertanian di Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari peran penyuluh pertanian sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan usaha tani di masyarakat.

Salah satu indikator adanya campur tangan penyuluh pertanian dalam perkembangan usaha tani petani binaannya adalah tingkat kinerja penyuluh pertanian itu sendiri. Apabila kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya sudah baik, maka perkembangan petani yang dibina akan maksimal dan kesejahteraannya meningkat yang ditunjukkan melalui adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan usaha taninya.

Departemen Pertanian (2009) menyatakan bahwa Penyuluhan Pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai unit kerja non struktural dengan wilayah kerja satu kecamatan, selama ini telah melaksanakan fungsinya sebagai tempat interaksi para penyuluh pertanian, pelaku utama, dan pelaku usaha pertanian. Oleh karena itu BPP mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. BPP menjadi garda terdepan

dalam pengawalan dan sinergi program-program pembangunan pertanian, terutama mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani (Afriyandi dkk., 2020).

BPP Kecamatan Purwadadi terdiri dari 9 desa, yang terbagi habis dalam 4 wilayah Binaan (Wilbin) yaitu Wilbin Purwajaya, Padaringan, Bantardawa, dan Purwadadi. Data Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian di BPP Kecamatan Purwadadi Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian di BPP Kecamatan Purwadadi Tahun 2019

| No | Wilbin / WKPK | Desa | Nama Petugas / Penyuluh | Pangkat/ Gol. |
|----|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Wilbin Purwajaya | Purwajaya Sidarahayu | Resa Adesetiani, SP | Penata Muda Tk.I/IIIb |
| 2. | Wilbin Padaringan | Padaringan Sukamulya | Eris Yuliana, SP | THL-TBPPD |
| 3. | Wilbin Bantardawa | Bantardawa Kutawaringin | Candra Desiana, SP | THL-TBPPD |
| 4. | Wilbin Purwadadi | Purwadadi Pasirlawang Karangpaningal | Ipin Saripin | THL-TBPPD |

Sumber: BPP Kecamatan Purwadadi 2020

Khusus untuk wilayah kerja BPP Kecamatan Purwadadi, membawahi 9 desa dengan jumlah total kelompok tani sebanyak 109 kelompok tani sedangkan jumlah penyuluh pertanian yang ada yaitu sebanyak 4 orang penyuluh. Secara aturan bahwa jumlah penyuluh yang ada kuranglah cukup untuk membina seluruh petani dari sembilan desa dan terdapat 109 kelompok tani. Secara logika bahwa dengan jumlah kelompok tani yang begitu banyak penyuluh akan mengalami kesulitan dalam pelayanannya yang hanya dilayani oleh 4 orang penyuluh pertanian. Kalau dibagi rata maka setiap penyuluh tersebut akan membina sekitar 27-28 kelompok tani.

Banyaknya jumlah kelompok tani binaan untuk setiap penyuluh menyebabkan kelompok tani tidak dapat bertemu secara intensif dengan penyuluh. Disamping itu dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19 turut menambah daftar permasalahan pada aktivitas penyuluhan. Metode tatap muka yang biasanya dihadiri oleh banyak orang, beberapa bulan terakhir tidak dapat dilakukan. Padahal peranan penyuluh sangat diperlukan karena dapat menunjang hasil produksi padi petani melalui

pengadopsian berbagai teknologi baru yang diperkenalkan oleh penyuluh. Dengan demikian maka pelayanan penyuluh pertanian terhadap petani binaannya perlu ditingkatkan sehingga kompetensi para petani semakin meningkat guna menghadapi perkembangan Iptek dan pasar global. Berdasarkan kenyataan tersebut maka perlu dikaji tentang kinerja pelayanan penyuluh pertanian di BPP Kecamatan Purwadadi.

Kinerja pelayanan penyuluh pertanian dapat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat tani dalam memperoleh pelayanan dari penyuluhnya. Kotler (2006) menyatakan terdapat lima dimensi kualitas jasa, yaitu: *Tangible* (berwujud), *Reliability* (keandalan), *Responsiveness* (kesigapan), *Assurance* (jaminan), *Empathy* (empati). Dalam setiap dimensi tersebut terdapat atribut-atribut pelayanan yang dijadikan indikator penilaian kepuasan petani terhadap kinerja penyuluh pertanian.

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan (Kotler, 2006). Apabila penyelenggaraan penyuluhan tersebut dilaksanakan secara benar, kontinyu, dan konsisten, maka tingkat kepuasan petani juga akan tinggi yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup petani (Arifin, 2015).

Mengingat belum pernah dilakukannya pengukuran tingkat kepuasan di BPP Kecamatan Purwadadi, maka perlu dilakukan penelitian yang dapat mengukur tingkat kepuasan petani terhadap kinerja penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian di BPP Kecamatan Purwadadi perlu mengetahui sejauh mana petani merasakan kepuasan tersebut terhadap layanan yang diberikan. Hal ini berguna bagi penyuluh pertanian sebagai pemberi layanan agar selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dapat disusun meliputi:

1. Bagaimana tingkat kepentingan dan kinerja dilihat dari dimensi pelayanan penyuluh pertanian BPP Kecamatan Purwadadi?

2. Atribut mana yang menjadi prioritas peningkatan kinerja pelayanan penyuluh pertanian BPP Kecamatan Purwadadi?
3. Bagaimana tingkat kepuasan petani terhadap kinerja pelayanan penyuluh pertanian BPP Kecamatan Purwadadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dijabarkan untuk mengetahui:

1. Tingkat kepentingan dan kinerja dilihat dari dimensi pelayanan penyuluh pertanian BPP Kecamatan Purwadadi.
2. Atribut mana yang menjadi prioritas peningkatan kinerja pelayanan penyuluh pertanian BPP Kecamatan Purwadadi.
3. Tingkat kepuasan petani terhadap kinerja pelayanan penyuluh pertanian BPP Kecamatan Purwadadi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi dan pertimbangan yang berguna bagi:

1. Penulis atau mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan mengembangkan kemampuan di bidang penyuluhan pertanian, serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepuasan petani terhadap kinerja penyuluh pertanian.
2. Penyuluh pertanian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memilih atribut prioritas yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan penyuluh pertanian di kemudian hari.

Pemerintah dan instansi terkait, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terhadap petani maupun kinerja penyuluh pertanian.